



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI  
RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020-2021  
KE PROVINSI BALI  
15-19 FEBRUARI 2021**

\*

\*

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

\*

\*

**JAKARTA 2021**



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI  
RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020-2021  
KE PROVINSI BALI  
15-19 FEBRUARI 2021**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Bali adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
  - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 3 Desember 2020.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 12 Januari 2021. Keputusan Rapat Koordinasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi IV DPR RI tanggal 2 Februari 2021 perihal Daerah Kunjungan Kerja Komisi I s.d. Komisi XI DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Bali adalah untuk:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Bali;
2. Melihat langsung di lapangan manfaat dari realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang kerja Komisi IV DPR RI di Provinsi Bali; serta
3. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

### **C. RUANG LINGKUP**

Sasaran Kunjungan Kerja Reses meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi IV DPR RI, yaitu Bidang Pertanian, Pangan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan.

### **D. SUSUNAN TIM**

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Bali dipimpin oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP), dengan susunan Anggota Tim sebagaimana terlampir.

### **E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN**

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Bali dilaksanakan pada tanggal 15-19 Februari 2021 dan bertempat di Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana.

### **F. LOKASI KUNJUNGAN KERJA**

1. Gudang Pupuk di Mengwi, Kabupaten Tabanan.
2. Gudang Bulog di Sempidi, Kabupaten Badung.
3. Budi Daya Koral di Serangan, Denpasar.

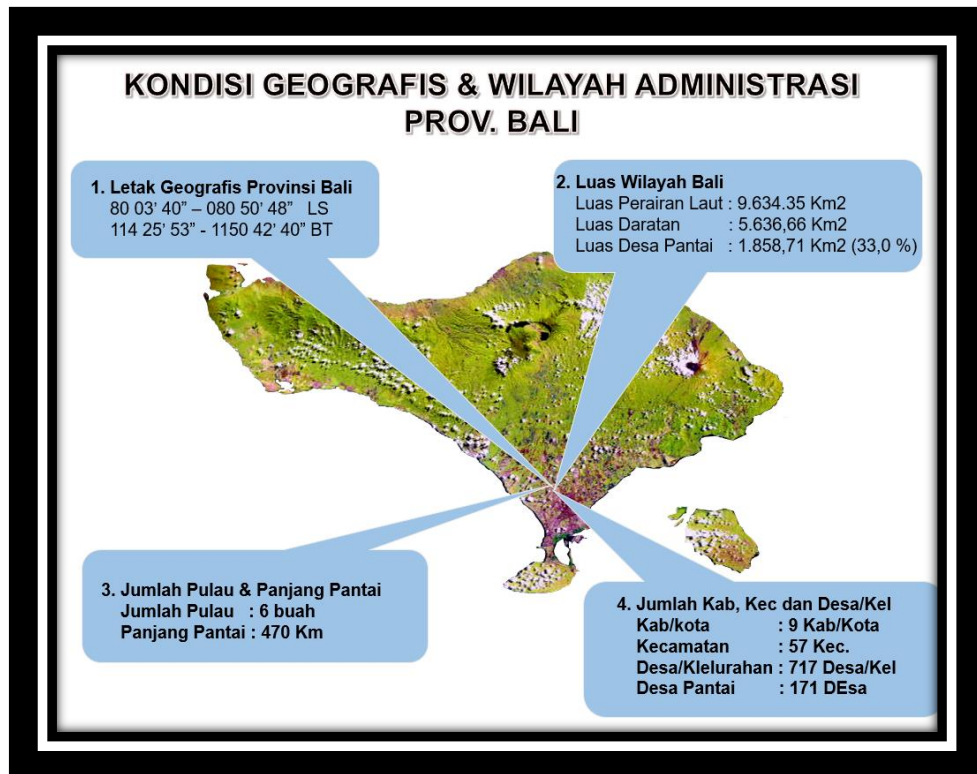
4. Budi Daya Kerapu di Serangan, Denpasar.
5. Taman Nasional Bali Barat, Kabupaten Buleleng.
6. Balai Penelitian Ternak Unggul-Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar, Kabupaten Jembrana.

## II. GAMBARAN UMUM

Secara geografis Provinsi Bali terletak pada 80°3'40" - 80°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" - 115°42'40" Bujur Timur dengan luas total wilayah sebesar 5.634,40 ha dan panjang pantai mencapai 470 km. Sementara untuk relief dan topografi di tengah-tengahnya terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Sedangkan batas fisiknya adalah:

- Utara: Laut Bali.
- Timur: Selat Lombok (Provinsi Nusa Tenggara Barat).
- Selatan: Samudera Indonesia.
- Barat: Selat Bali (Provinsi Jawa Timur).

Secara administrasi, Provinsi Bali terbagi menjadi delapan kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Bangli, Buleleng, dan Kota Denpasar yang juga merupakan ibukota provinsi. Selain Pulau Bali Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau kecil lainnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan di wilayah Kabupaten Klungkung, Pulau Serangan di wilayah Kota Denpasar, dan Pulau Menjangan di Kabupaten Buleleng.



Penduduk Bali kira-kira sejumlah 4.236.983 jiwa (2019) dengan mayoritas 86,91% menganut agama Hindu. Agama lainnya adalah Islam (10,05%), Kristen Protestan (1,56%), Katolik (0,79%), Buddha (0,68%), Konghucu (0,01%), dan Kepercayaan (kurang dari 0,01%).

Selain dari sektor pariwisata, penduduk Bali juga hidup dari pertanian dan perikanan, yang paling dikenal dunia dari pertanian di Bali ialah sistem Subak. Sebagian juga memilih menjadi seniman. Bahasa yang digunakan di Bali adalah bahasa Indonesia, Bali, dan Inggris khususnya bagi yang bekerja di sektor pariwisata. Tiga dekade lalu, perekonomian Bali sebagian besar mengandalkan dan berbasis pada pertanian, baik dari segi output maupun kesempatan kerja. Sekarang, industri pariwisata menjadi objek pendapatan terbesar bagi Bali. Hasilnya, Bali menjadi salah satu daerah terkaya di Indonesia. Pada tahun 2003, sekitar 80% perekonomian Bali bergantung pada industri pariwisata. Pada akhir Juni 2011, *non-performing loan* dari semua bank di Bali adalah 2,23%, lebih rendah dari rata-rata *non-performing loan* industri perbankan Indonesia (sekitar 5%).

### **III. HASIL KUNJUNGAN**

#### **Gudang Pupuk di Mengwi, Kabupaten Tabanan**

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke gudang pupuk di Mengwi guna mengetahui sejauhmana ketersediaan pupuk terutama dalam menghadapi musim tanam. Gudang pupuk Mengwi ini menyalurkan untuk 3 (tiga) wilayah yaitu, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar. Terdapat beberapa keluhan keterlambatan penyaluran seperti di tabanan, dan jembrana. Selain itu, di Desa Gerokgak, Buleleng terdapat petani yang sudah melakukan pembayaran, namun hingga saat kegiatan kunjungan kerja yang lalu belum mendapatkan pupuk yang dibutuhkan. Beberapa hal yang sering terjadi dan menjadi potensi masalah antara lain belum menyerahkan dokumen e-RDKK, kemudian pihak distributor baru bisa melakukan penyaluran setelah ada SK dari daerah, sedangkan di lapangan pupuk sudah dibutuhkan. Selain itu, proses penyaluran yang panjang dan lama dari sejak pengusulan hingga penyaluran juga ditengarai menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyaluran pupuk.

Menanggapi hal tersebut, Komisi IV DPR RI meminta pihak Pupuk Indonesia untuk segera menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan, dan meminta agar penyaluran pupuk bersubsidi jangan menjadi permasalahan. Selain itu, secara spesifik Komisi IV DPR RI juga meminta agar PT Pupuk Indonesia melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap kinerja distributor.

. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian yaitu salah satu dampak dari pandemi Covid-19 ini yang menyebabkan semakin banyak bermunculan petani baru dimana peluang untuk terdaftar dalam Simluhtan atau membentuk kelompok tani maupun terdata dalam e-RDKK sangatlah kecil. Oleh karena itu, perlu untuk dicari jalan keluarnya, sehingga petani baru tersebut juga memiliki akses terhadap sarana dan prasarana produksi pertanian, seperti akses terhadap pupuk.

Persoalan lainnya, masih terdapat ketidaksinkronan data RDKK terhadap pupuk yang akan disalurkan. Terkait hal itu, PT Pupuk Indonesia akan mencari alternatif persyaratan penebusan bagi petani yang memiliki ketidaksinkronan data RDKK tersebut. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia untuk melakukan konsultasi dengan BPK berkenaan dengan usulan alternatif

persyaratan penebusan pupuk bersubsidi. Komisi IV DPR RI juga mengusulkan kepada PT Pupuk Indonesia agar menunjuk pengampu (kontak person) distributor sebagai penanggung jawab untuk satu wilayah penyaluran, atau pendamping yang bisa ditunjuk dari pihak dinas. Kemudian pada saat diskusi, Komisi IV DPR RI mengingatkan kembali agar jangan ada lagi praktik pembelian secara paket (*bundling*). Selain itu, perlu dilakukan komunikasi dan sinergitas antarpihak terkait agar tidak terjadi permasalahan dalam hal penyaluran dan berharap PT Pupuk Indonesia untuk mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi.

### **Gudang Bulog di Sempidi, Kabupaten Badung**

Pada kunjungan kali ini, Komisi IV DPR RI selain melihat kesiapan Bulog dalam menjaga ketersediaan beras dan melihat sarana gudang, juga dilakukan pertemuan dan diskusi dengan pihak Bulog dengan menghadirkan mitra terkait lainnya. Dari hasil pertemuan diperoleh informasi bahwa area kerja Kantor Wilayah Bali meliputi wilayah Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar. Perum Bulog Divre Bali memiliki Unit Pengelolaan Gabah Beras (UPGB) di kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Adapun gudang yang dimiliki sebanyak 22 unit dengan kapasitas total 41.500 ton yang terletak di wilayah Batubulan (1 unit - 3.500 T), Kauripan (2 unit-2.000T), Bebalang (1 unit-2.000T), Kediri I (3 unit-8.000T), Kediri II (2 unit-7.000T), Penyangan (2 unit-2.000T), Tangguwisia (1 unit-2.000T), Jimbaran (8 unit – 8000T), dan Sempidi (2, unit-7.000T).

Selanjutnya, dalam pertemuan juga diperoleh gambaran pencapaian kinerja operasional per Februari 2021 untuk wilayah regional Bali sebagai berikut:

#### **a. Realisasi Pengadaan Kantor Wilayah Bali**

(dalam ton)

NO	KANTOR WILAYAH/KANTOR CABANG	2020			2021		
		TARGET	REALISASI	% REAL vs TARGET	TARGET	REALISASI *)	% REAL vs TARGET
1	KANWIL BALI	6.000	6.117	101,96%	7.100	412	5,80%
TOTAL		6.000	6.117	101,96%	7.100	412	5,80%

\*) per 10 Februari 2021 (sore)

## b. Penyaluran BPNT Tahun 2020 Kantor Wilayah Bali

NO	KANWIL	KOMODITI	PENJUALAN BPNT 01 JAN SD 31 DES 2020				TOTAL PENJUALAN BPNT	
			Melalui RPK, E-Warong dan Agen		Melalui Distributor		Kg	Rp
			Kg	Rp	Kg	Rp		
1	BALI	BERAS	5,422,355	54,659,134,250	-	-	5,422,355	54,659,134,250
		TELUR	-	-	-	-	-	-

Sumber data : aplikasi penjualan langsung dan SIL

Keterangan :  
Kanwil : Kantor Wilayah

## c. Penyaluran BPNT Tahun 2021 Kantor Wilayah Bali

NO	KANWIL	KOMODITI	PENJUALAN BPNT 01 JAN SD 10 FEB 2021				TOTAL PENJUALAN BPNT	
			Melalui RPK, E-Warong dan Agen		Melalui Distributor		Kg	Rp
			Kg	Rp	Kg	Rp		
1	BALI	BERAS	639,380	6,421,121,500	-	-	639,380	6,421,121,500
		TELUR	-	-	-	-	-	-

Sumber data : aplikasi penjualan langsung dan SIL

Keterangan :  
Kanwil : Kantor Wilayah

## d. Posisi Persediaan Beras CBP Kantor Wilayah Bali 2020

Satuan: ton

NO	UNIT KERJA	BERAS CBP	BERAS KOMERSIAL	TOTAL
1	Kanwil Bali	3.755	158	3.913
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.755</b>	<b>158</b>	<b>3.913</b>

\*) per 31 Desember 2020 (closing)

## e. Posisi Persediaan Beras CBP Kantor Wilayah Bali 2021

Satuan: ton

NO	UNIT KERJA	BERAS CBP	BERAS KOMERSIAL	TOTAL
1	Kanwil Bali	3.146	39	3.185
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.146</b>	<b>39</b>	<b>3.185</b>

\*) per 10 Februari 2021 (closing)

Bulog harus mampu berperan untuk menjaga inflasi, harga dan ketersediaan pangan. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI meminta agar kebijakan yang ada saat ini harus dipertajam, serta meminta agar Bulog jangan hanya fokus kepada bisnisnya saja. Selanjutnya, dalam diskusi juga terungkap



bahwa Perum Bulog mendapatkan izin importasi daging kerbau, sedangkan untuk impor daging sapi izin diberikan kepada PT Berdikari.

Hal yang juga menjadi bahan diskusi adalah, Bulog mendapatkan tugas untuk menyerap beras petani namun tidak diberikan tugas untuk melepaskan beras. Sehingga kapasitas gudang bulog menjadi penuh, dikhawatirkan ketika memasuki musim panen, Bulog tidak mampu menyerap beras petani. Untuk itu, Bulog berharap untuk diberikan tugas melepaskan beras dan diberikan penugasan untuk BPNT. Selain itu, juga berharap agar fungsi Perum Bulog dikembalikan dimana Bulog sebagai operator, dan penugasan hanya berasal dari satu pihak saja. Dalam pertemuan, Komisi IV DPR RI menyampaikan agar Perum Bulog harus mengantisipasi lonjakan harga daging, mengingat dalam waktu dekat akan menghadapi bulan puasa dan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN).

### **Budi Daya Koral di Serangan, Denpasar**

Komisi IV DPR RI pada kesempatan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Bali, Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengunjungi 2 lokasi yaitu Lokasi Penangkaran atau Budidaya Koral/Karang Hias salah satu anggota Kelompok Pembudi Daya Karang Hias Nusantara (KPKHN) di Pulau Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Taman Nasional Bali Barat, di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

KPKHN adalah organisasi yang menaungi pelaku budi daya koral/karang hias hasil transplantasi yang memiliki izin edar dalam negeri dan atau luar negeri. Organisasi ini didirikan pada tanggal 24 November 2018 dan berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Pembentukan KPKHN berasal dari kesadaran sebagai pelaku budi daya karang hias dan sekaligus pengedar dalam dan atau luar negeri karang hias hasil transplantasi mengenai sumber daya alam, baik flora maupun fauna Indonesia adalah salah satu kekayaan alam yang perlu dimanfaatkan sebagai aset pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam pengelolaan sumber daya tersebut harus memperhatikan kelestariannya menyeimbangkan antara prinsip pemanfaatan, prinsip konservasi, dan prinsip keberlanjutan.

No	Provinsi	Nama Perusahaan	Lokasi Perusahaan	Lokasi Penangkaran	Penanggung jawab
1	Bali	CV Bali Aquarium	Denpasar	Serangan, Patas, Candidasa	Ni Wayan Suhartini, S.E.
2		CV Bali Samudra Anugerah	Buleleng	Pantai Jungut Batu, Pantai Les	Agus Joko Supriyanto
3		PT Agung Aquatic Marine	Badung	Serangan, Pandawa	Surya Wirawan
4		PT Aneka Karang Sepanjang	Denpasar	Serangan	Sahrudin
5		PT Tanjung Sari Aquarium	Denpasar	Serangan	I Komang Oka
6		PT Bali Double C	Badung	Serangan, Gilimanuk	Alvia Indah
7		UD Marine Dewata Sejahtera	Denpasar	Serangan	Kusman
8		UD. Srikandi Aquarium	Banyuwangi	Pantai Ketapang	I Ketut Sukandi
9		UD Jaya Ornamental Fish	Banyuwangi	Pantai Ketapang	Decki
10		UD. Dewa Ruci	Banyuwangi	Pantai Ketapang, Pantai Bangsring	Supri
11		CV Baruna Jaya	Banyuwangi	Pantai Ketapang	I Gede Wita
12		PT.Aristoratama Bina Usaha	Banyuwangi	Pantai Ketapang	Ahmad Daniel
13		PT.Dunia Alam Mulia	Banyuwangi	Pantai Ketapang	Surya Wirawan
14	NTB	PT Lombok Samudra Abadi	Lombok Barat	Sumbawa	Deddy Kusuma

Selama Pandemi 2020 usaha budi daya penangkaran karang hias/koral melakukan ekspor dengan nilai Rp10.469.496.398,00. Sedangkan pemanfaatan karang hias selama 2020 sebanyak 88.507 potong.

## Realisasi Pemanfaatan Karang Hias 2020

No.	Nama Perusahaan	Realisasi 2020 (Pcs)	Nilai Ekspor (Rp)
1	PT. Agung Aquatic Marine	5.443	544.300.000
2	PT. Bali Double C	36.925	4.878.958.000
3	PT. Bali Samudra Anugrah	6.145	693.911.398
4	PT. Tanjung Sari Aquarium	4.266	426.600.000
5	CV. Bali Aquarium	10.182	1.398.100.000
6	PT. Aristocratama Bina Usaha	9.551	955.100.000
7	UD. Srikandi Aquarium	13.467	1.346.700.000
8	PT. Dunia Alam Mulia	2.528	252.800.000

Sedangkan jumlah indukan dan anakan yang saat ini dibudidayakan di Pulau Serangan adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Jumlah Meja indukan	Jumlah Meja Anakan	Jumlah Jenis yang ditransplantasi	Jumlah Indukan	Jumlah Anakan
1	CV. Bali Aquarium	450	250	20	9.271	18.555
2	PT. Agung Aquatic Marine	45	25	12	811	2.482
3	PT. Aneka Karang Sepajang	58	55	6	1.100	4.850
4	PT. Tanjung Sari Aquarium	125	90	12	2.451	7.221
5	PT. Bali Double C	50	200	9	925	3.370
6	UD. Marine Dewata Sejahtera	Belum aktif				

Dari ribuan jenis koral yang hidup di alam, saat ini baru beberapa saja yang bisa dilakukan transplantasi, dikarenakan keterbatasan teknologi dan pertumbuhan koral yang sangat lambat setiap tahun. Diantara jenis koral yang bisa ditransplantasi, antara lain:

## Jenis yang ditransplantasi



Pengembangan budi daya koral di Pulau Serangan memiliki keunggulan, antara lain lokasi yang strategis, aksesabilitas, dan transportasi mudah serta kondisi lingkungan laut meliputi salinitas, pH serta kedalaman air yang baik untuk pengembangan jenis koral bintang 1 dan bintang 2. Partisipasi dan peran serta masyarakat Serangan yang aktif terlibat serta memiliki keterampilan dan terbiasa melakukan perawatan koral.

Namun kondisi di Pulau Serangan bukan tidak ada masalah dalam pengembangan koral di Pulau Serangan, antara lain:

1. Kondisi perairan di Serangan banyak mengandung algae yang dapat mengganggu pertumbuhan karang hias. Tetapi hal ini dapat dikurangi dengan melakukan perawatan dan pembersihan karang hias secara maksimal.
2. Perubahan cuaca yang ekstrim dan kenaikan suhu dapat menyebabkan karang hias mengalami *bleaching*/pemutihan.
3. Arus yang kencang dapat menyebabkan karang terbara arus, sehingga diperlukan metode yang tepat pada saat penanaman.
4. Kemudahan akses menyebabkan rawan pencurian sehingga perlu pengawasan ekstra.
5. Limbah dari kapal-kapal wisata yang bertebaran di sekitar perairan Pulau Serangan serta limbah kotoran babi yang masuk ke laut dapat mencemari perairan dan berdampak buruk bagi pertumbuhan karang hias, sehingga perlu adanya zonasi di kawasan perairan.
6. Mekanisme perizinan satu pintu yang lambat, memakan waktu 8 s.d. 8 bulan yang mengakibatkan terhambatnya operasional usaha.

### **Budi Daya Kerapu di Serangan, Denpasar**

Salah satu komoditas ekspor perikanan Indonesia adalah ikan kerapu (Kusumawati et al, 2013), yakni harga ekspor ikan kerapu di Indonesia pada tahun 2018 adalah \$ 13.2/kg, dimana selama 4 tahun terakhir, jumlah ekspor ikan kerapu di Indonesia mencapai 5.32 % dari total produksi sebesar 16.8 ton/tahun (Tridge, 2018). Selain komoditas ekspor, ikan kerapu termasuk sebagai komoditas masyarakat lokal (Nusabali, 2017). Pulau Serangan termasuk dalam wilayah Denpasar Selatan yang strategis untuk melakukan pengembangan budi daya laut, dimana pada dasarnya perairan utara Serangan sudah dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat budidaya ikan kerapu dan rumput laut.

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Kelautan tahun 2018 bahwa produksi ekspor ikan kerapu di Provinsi Bali didapatkan, bahwa periode bulan Juli 2015 sebesar 146.48 ton telah mengalami penurunan pada periode Juli 2016 sebesar 58.63 ton, sedangkan produksi rumput laut selama periode 2013 - 2015 mengalami penurunan yaitu dari 175 ton menjadi 129 ton. Luas Lahan Potensial

usaha budi daya laut (budi daya rumput laut, kerapu, lobster, mali-mali, baronang, dan ikan kerapu) adalah sebesar ± 15 Ha. Potensi ini terutama di Pantai Kelurahan Serangan, hasil reklamasi Pulau Serangan.

Kota Denpasar adalah salah satu penghasil produk-produk perikanan di Pulau Bali. Menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, produksi perikanan Kota Denpasar Tahun 2020 sebesar 21,1 ribu ton dengan nilai Rp972.079.047.000,00. Artinya selama pandemi Covid-19 produksi perikanan dari Pulau Bali khususnya Kota Denpasar tidak terganggu.

Pulau Serangan adalah salah satu tempat budi daya Ikan Kerapu yang ada di Kota Denpasar. Menurut catatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, data kelompok Pembudi Daya Ikan Budi Daya Laut (KJA Kerapu dan Lobster) adalah sebagai berikut:

**Data Kelompok Pembudi Daya Ikan Budi Daya Laut (KJA Kerapu dan Lobster)  
Kota: Denpasar**

No.	Nama Kelompok	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Jumlah Petak/Lubang	Produksi Tahun 2020 (kg)	Alamat	
						Desa /Kel.	Kecamatan
1.	Sarimerta Segara	I Made Jjir	14 orang	28 (3x3 m)	Kerapu 1000 kg	Serangan	Denpasar Selatan
2.	Jaba Segara	I Ketut Sutaya	10 orang	11 (3x3 m : 4 lubang) (2x3 m : 7 lubang)	-	Serangan	Denpasar Selatan
3.	Mertha Segara Asih	I Wayan Sutana	10 orang	4 (3x3 m)	-	Serangan	Denpasar Selatan
4.	Segara Ayu	I Wayan Roja	10 orang	12 (3x3 m : 8 lubang) (3x1 m : 4 lubang)	-	Serangan	Denpasar Selatan
5.	Saka Segara Pulomas	I Wayan Pimpin Astra	10 orang	4 (3x3 m)	-	Serangan	Denpasar Selatan
6.	Laut Bali	I Made Terima	10 orang	8 (3x3 m)	-	Serangan	Denpasar Selatan

Acara Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Pulau Serangan memberikan bantuan Benih Ikan Kerapu kepada salah satu Kelompok Pembudi Daya Ikan (POKDAKAN) yaitu Sarimerta Segara. POKDAKAN Sarimerta membudidayakan Ikan Kerapu jenis Cantang dengan luas kurang lebih 1.000 m<sup>2</sup> dan memproduksi 2,5 ton per tahun dengan harga 80.000 per kilogram.

Peluang pasar produksi perikanan budi daya di Kota Denpasar cukup tinggi karena banyak masyarakat dan wisatawan lebih senang dengan menu ikan. Hal ini tercermin dari menjamurnya restoran di Kota Denpasar yang menyajikan menu ikan hasil budi daya. Peluang merket yang cukup besar ini perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan produksi dan diversifikasi jenis dan produk perikanan seperti udang, rumput laut, abalon, dan kerang-kerangan.

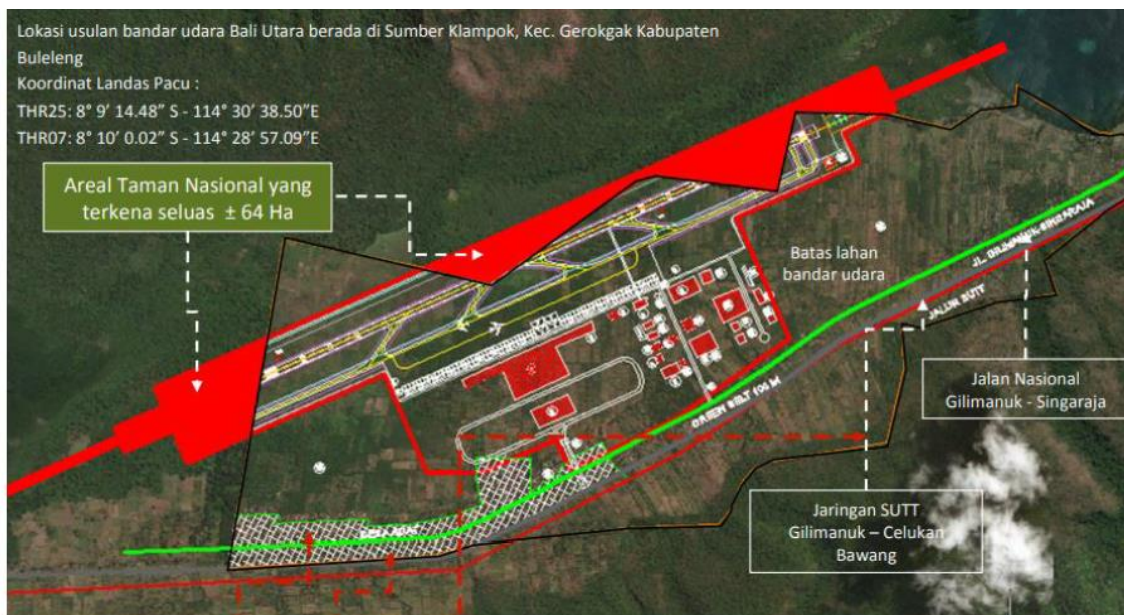
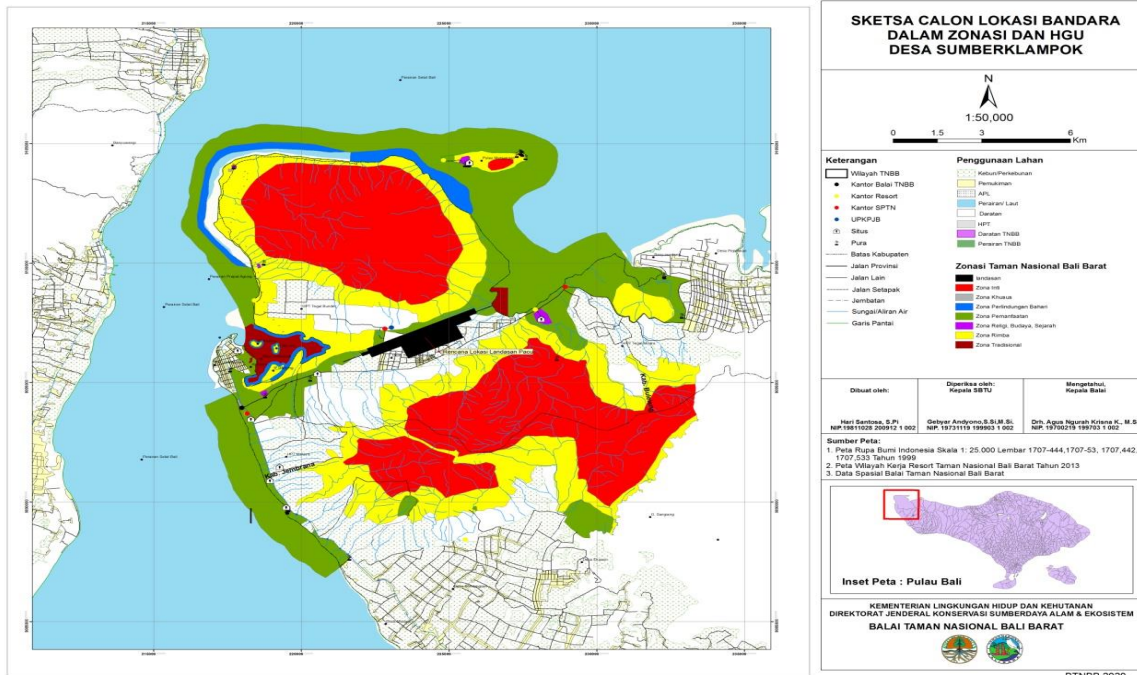
### **Taman Nasional Bali Barat, Kabupaten Buleleng**

Taman Nasional Bali Barat berdiri sejak 10 Agustus 1947 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Raja di Bali perihal "Penetapan hutan Banyuwedang (19.365,6 Ha) sebagai Taman Pelindung Alam untuk melindungi Jalak Bali & Harimau Bali". Menurut SK MENHUT NO.493/KPTS-II/1995 Luas TNBB sebesar 19.002,89 Ha (Daratan =15.587,89 Ha & Laut = 3.415 Ha).

Taman Nasional Bali Barat (TNBB) merupakan tempat perlindungan bagi kelangsungan/keberadaan Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) yang statusnya kritis (*Red data book* IUCN) dan Apendix I menurut CITES, serta merupakan rumah bagi fauna yang terdiri dari 18 jenis mamalia, 18 jenis reptilia, 205 jenis aves, 12 jenis amphibia, 82 jenis kupu-kupu, dan lebih dari 120 jenis ikan (Penelitian U dan TNBB tahun 2015. Selain keanekaragaman fauna, di TNBB juga terdapat terdapat 6 jenis flora yang dilindungi dan masuk kategori langka menurut IUCN, 18 jenis flora di mangrove, 66 jenis di hutan musim, 55 jenis di savanna, 72 jenis di hutan hujan dataran rendah.

Rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Desa Sumberklampok memerlukan lahan seluas 370 Hektar yang mana, 64 hektar berada di dalam Taman Nasional Bali Barat (sumber paparan TNBB dan Kemenko Perekonomian) Rencana lokasi Bandara Bali Utara sebagai berikut:



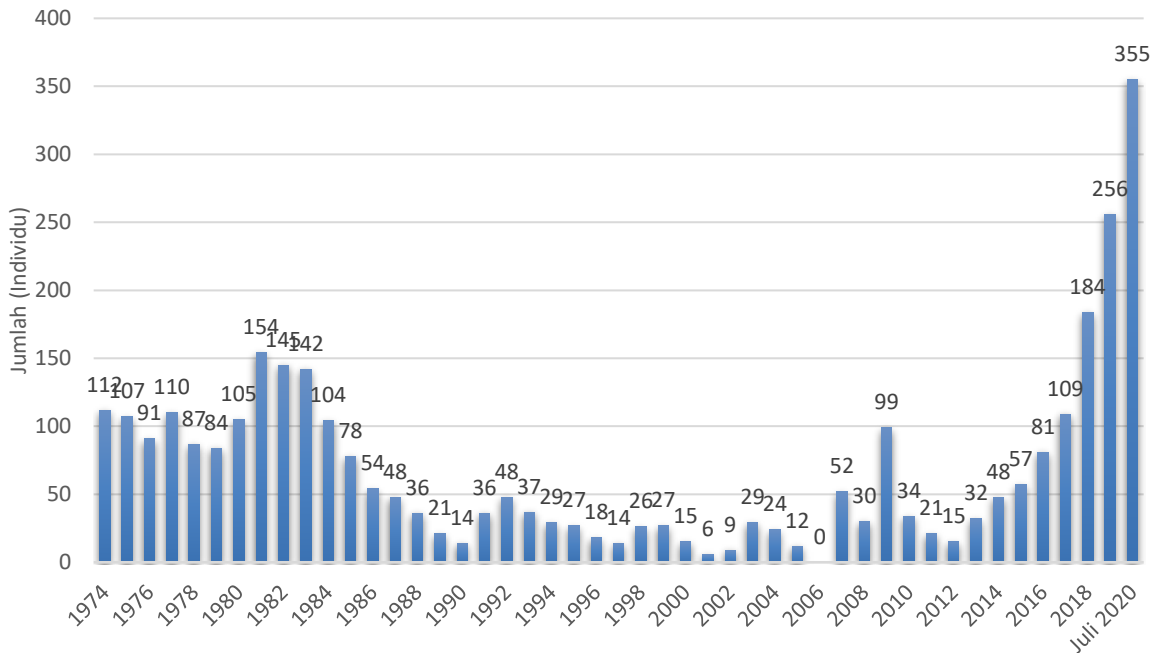


Fakta lain adalah, lokasi Bandara Bali Utara berada di dalam zona pemanfaatan yang di dalam nya terdapat satwa kera hitam, kera abu, rusa, kijang, babi hutan dan ayam hutan dan bersebelahan langsung dengan zona khusus yang banya di temukan curik bali salah satu satwa yang dilindungi.

Curik Bali masuk ke dalam Spesies yang dilindungi dan keberadaannya pernah tidak di jumpai di habitat aslinya pada tahun 2006, yaitu Taman Nasional



Bali Barat. Namun berkat upaya yang dilakukan Balai Taman Nasional Bali Barat beserta warga di sekitar taman nasional, pelan pelan populasi Curik Bali mulai meningkat dan pada juli 2020 Populasi Curik Bali yang ditemukan di alam sebanyak 355 individu.



Upaya-upaya yang dilakukan Balai Taman Nasional untuk menjaga dan melindungi kawasan antara lain secara In-Situ dan Ex-Situ dengan cara:

- Perlindungan dan Pengamanan (In-Situ).
- Pembinaan Populasi (In-Situ).
- Pembinaan Habitat (In-Situ).
- Monitoring (In-Situ).
- Kerjasama dengan BKSDA Bali, Gakkum, Penangkar, Lembaga Konservasi, Asosiasi dan LSM (Ex- Situ).
- Restocking (In-Situ dan Ex-Situ).
- Pemberdayaan Masyarakat (In-Situ dan Ex-Situ).
- Riset (In-Situ dan Ex-Situ).
- Genetik (In-Situ dan Ex-Situ).
- Penegakan hukum (In-Situ dan Ex-Situ).

Rencana landasan pacu berada pada bagian: Zona Pemanfaatan Darat Teluk Kotal (luas total 323,9 ha) dan Zona Pemanfaatan Darat Tegal Bunder –

Sumbersari (luas total 657,7 ha). Walaupun berada dalam zona pemanfaatan, keberadaan bandara berpotensi mengakibatkan fragmentasi habitat serta dampak pencemaran lingkungan yang berasal dari emisi pesawat serta suara bising yang ditimbulkan pada saat terbang, mendarat serta jalan di *run-way*.

Pada kesempatan diskusi di Ruang Pertemuan Balai Taman Nasional Bali Barat salah satu stake holder yang diundang adalah masyarakat Desa Sumberklampok yang diwakili oleh Perbekel (kepala desa) Desa Sumberklampok. Perbekel Sumberklampok menyampaikan bahwa warga masyarakat yang saat ini mendiami calon lokasi Bandara Bali Utara adalah keturunan ketiga dari leluhur yang pertama kali datang ke desa untuk menjadi pekerja di Perkebunan Belanda yang dahulu ada. Leluhur warga berasal dari beberapa daerah di Bali seperti Singaraja dan Buleleng. Pasca tutupnya perkebunan di Desa Sumberklampok, warga, dan keturunannya yang dahulunya pekerja di perkebunan Belanda, melakukan kegiatan pertanian dan membangun pemukiman serta fasilitas umum. Karena itu, warga desa mengajukan beberapa kali permohonan kepemilikan lahan yang selama ini digarap ke Pemerintah Provinsi Bali. Setelah beberapa generasi berlalu, baru pada periode kepemimpinan gubernur sekarang Pemerintah Provinsi Bali dan Warga Desa Sumberklampok menyepakati pembagian lahan ex perkebunan menjadi milik pmda dan masyarakat. Skema untuk masyarakat akan menggunakan proses Tanah Untuk Reformasi Agraria (TORA). Proses TORA yang dilakukan oleh pemerintah masih berjalan, tiba-tiba ada rencana pembangunan Bandara Bali Utara di atas lokasi tanah yang selama ini dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Oleh karena itu, pada forum diskusi dengan Komisi IV DPR RI perwakilan warga menyampaikan penolakan rencana pembangunan Bandara Bali Utara.

Melihat permasalahan yang ada perihal rencana Bandara Bali Utara akan dibangun di Desa Sumberklampok, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan kajian yang komprehensif termasuk melibatkan pakar mengenai dampak bandara di dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat dan melaporkan hasil kajian tersebut ke Komisi IV DPR RI.

Komisi IV DPR-RI menekankan bahwa tanggung jawab kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian alam dan lingkungan dari kerusakan akibat eksploitasi dan pemanfaatan berlebihan sebagai bentuk pertanggungjawaban ke anak cucu serta pengejawantahan konsep spiritual masyarakat Bali, yaitu TRI HITA KARANA.

### **Balai Penelitian Ternak Unggul-Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar, Kabupaten Jembrana**

Balai Penelitian Ternak Unggul-Hijauan Pakan Ternak (BPU-HPT), didirikan dalam rangka peningkatan mutu genetik ternak Sapi Bali, yang merupakan plasma nutfah asli Indonesia, maka sapi bali perlu dilestarikan dan dilakukan pemuliaan. Dengan didirikannya Proyek Pembibitan Pengembangan Sapi Bali (P3 Bali) tahun 1977 sebagai Pusat Pembibitan Sapi Bali yang berlokasi di Pulukan, dan dibentuk plasma-plasma pembibitan di pedesaan melalui fasilitasi kredit yang disebut Instalasi Populasi Dasar (IPD).

Adanya kerja sama Pemerintah RI dengan NZ *Breeding Centre*, yang dilaksanakan di Pusat Pembibitan Sapi Bali Pulukan sebagai tempat pengujian mutu ternak Sapi Bali khususnya penghasil pejantan teruji (*tested bulls*). Tahun 1989 sebanyak 3 ekor *tested bull* dikirim ke BBIB Singosari sebagai pejantan penghasil semen. Kesepakatan Bersama Dirjen Peternakan dengan Pemerintah Provinsi Bali dengan MOU Nomor: 1803/Kpts/RC:110/12.06; Nomor 075/10865/B/TAPEM), yang mendasari pembentukan BPTU Sapi Bali. Selanjutnya tahun 2007 dibentuk BPTU Sapi Bali sesuai Permentan Nomor 13/Permentan/OT-1402/2007. Tahun 2013 adanya reorganisasi BPTU Sapi Bali menjadi BPTU-HPT Denpasar berdasarkan Permentan Nomor 52/Permentan/OT.140/5/2013.

BPTU-HPT Denpasar memiliki tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pelestarian, pengembangan, penyebaran, dan distribusi bibit ternak unggul sapi Bali serta melaksanakan produksi dan distribusi benih/bibit Hijauan Pakan Ternak. Hingga bulan Januari 2021 diketahui populasi sapi yang berada di BPU-HPT sebanyak 1.759 ekor,

dengan perbandingan sapi jantan sebanyak 587 ekor dan betina 1.72 ekor. Selengkapnya dapat dilihat di tabel di bawah ini:

**Tabel Populasi Sapi BPTU-HPT Denpasar**

Status	TAHUN (ekor)							
	2017		2018		2019		2020-Jan. 2021	
	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina
Anak (< 6 bln)	110	101	231	223	161	144	223	206
Muda (6-18 bln)	71	111	82	73	152	143	151	136
Dewasa (> 18 bln)	214	532	156	594	269	729	213	830
Jumlah	395	744	469	890	582	1.016	587	1.172
<b>Total</b>	<b>1.139</b>		<b>1.359</b>		<b>1.598</b>		<b>1.759</b>	

Selanjutnya dapat dilihat komposisi anggaran BPTU-HPT dalam 5 (lima) tahun terakhir. Berdasarkan tabel, anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp37.883.589.000,00 atau 1,78% dibandingkan dengan anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Secara detil, hal ini dapat dilihat pada 2 (dua) tabel berikut di bawah ini:

**Tabel Anggaran BPTU-HPT Denpasar 5 Tahun Terakhir**

No.	Uraian	TAHUN (dalam ribuan)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja pegawai (51)	3.079.356	3.423.340.	3.545.600	3.634.647	3.681.789
2	Belanja Barang (52)	17.160.725	14.404.748.	16.946.292	21.097.686	14.140.487
3	Belanja Modal (53)	8.689.300	1.542.405	280.000	1.272.000	5.556.304
4	Belanja Hibah ,526	-	4.795.000	35.158.970	3.642.000	14.505.000
	<b>JUMLAH :</b>	<b>28.929.381</b>	<b>24.165.493</b>	<b>55.930.862</b>	<b>29.646.333</b>	<b>37.883.589</b>

**Tabel Persentase Anggaran BPTU-HPT Denpasar pada Total Anggaran PKH**

No.	Uraian	TAHUN ( dalam ribuan)			
		2018	2019	2020	2021
1	BPTU	24.165.493	55.930.862.	29.646.333	37.883.589
2	Ditjen PKH	2.028.956.742	2.082.867.843	2.022.297.255	2.132.854.524
5	% Anggaran di total PKH	1,19%	2,69%	1,47%	1,78%

Sedangkan untuk realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Tahun	PAGU	Realisasi	Prosentase (%)
1	2017	28.929.381.000	26.607.812.943	91.98
2	2018	24.165.493.000	20.848.447.913	86.27
3	2019	55.930.860.000	53.881.390.402	96.34
4	2020	29.646.333.000	29.278.158.643	98.75
5	2021	37.883.580.000	997.896.434	2,63

Pada saat pertemuan, diperoleh gambaran bahwa untuk meningkatkan kinerja, BPTU-HPT akan melakukan pengembangan aplikasi sistem *recording* ternak, pakan, kesehatan dan distribusi. Kemudian mengatur pola perkawinan dan seleksi (performans & Sertifikasi). Hal lain adalah melakukan kepastian terhadap asset lahan dan melakukan fasilitasi sarana dan prasarana. Kegiatan fasilitasi yang dilakukan berupa pengembangan pagar *paddock* pipa galvanis dan tembok keliling; pembuatan jalan produksi/penghubung; pembangunan kandang beranak dan kandang sapih; pengembangan gudang pakan; pembangunan *loading cattle*, sistem biosekuriti dan klinik kesehatan hewan; pengembangan instalasi air dan tendon air; serta membangun unit pengolahan limbah.

BPTU-HPT Denpasar juga menghadapi beberapa tantangan, yaitu lahan *Breeding Centre* di Pulukan masih menggunakan lahan HGU Perusda Bali, dan dalam waktu dekat ada potensi untuk diambil alih oleh Pemda Bali. Sementara, BPTU-HPT Denpasar dengan lokasi *Breeding Centre* di Pulukan ini merupakan

satu-satunya lokasi pengembangan sapi bali murni, dengan produk sapi bibit yang sudah memiliki SNI.

Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan fasilitas BPTU-HPT Denpasar, diperlukan hibah lahan sehingga di masa mendatang tidak menjadi kendala dengan tertib administrasi dan peraturan. Tantangan lain adalah adanya rencananya pembangunan jalan tol Mengwi-Gilimanuk yang melalui lokasi BPTU-HPT Denpasar; serta terkait penertiban lahan di instalasi Dampu sesuai sertifikat sehingga pemanfaatan lebih optimal. Dengan status lahan yang belum clear, sehingga pihak BPTU-HPT tidak dapat melakukan pembangunan dan pengembangan instalasi.

Komisi IV DPR RI mengkritisi kesepakatan bersama antara pihak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Pemerintah Bali yang dinilai tidak ada ikatan hukum yang mengikat; serta tidak mengatur secara detail. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta agar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melakukan tindak lanjut dengan Gubernur Provinsi Bali untuk membicarakan perjanjian dan menghasilkan kesepakatan yang mengikat, serta mengusulkan untuk memberikan *privilege* kepada daerah, misalnya memberikan 50% bagian dari pemasukan kepada Provinsi Bali; atau juga lahan menggunakan mekanisme sewa maupun dibeli.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Komisi IV DPR RI akan bersinergi dengan Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dalam menyerap aspirasi dan menerima keluhan dari petani guna mencari jalan keluar serta merumuskan kebijakan terkait peningkatan produksi pangan nasional.
2. Komisi IV DPR RI meminta agar semua pihak bersinergi dan meningkatkan koordinasi dalam menjamin ketersediaan pasokan yang berkualitas dan stabilitas harga pangan pokok, sehingga pangan yang diterima masyarakat sebagai konsumen tersedia dengan cukup, terjangkau, dan aman dan bergizi untuk dikonsumsi tanpa merugikan petani sebagai produsen.
3. Komisi IV DPR RI juga meminta agar PT Pupuk Indonesia melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap kinerja distributor. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta para pihak terkait melakukan komunikasi dan sinergitas

- agar tidak terjadi permasalahan dalam hal penyaluran dan berharap PT Pupuk Indonesia untuk mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi.
4. Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia untuk melakukan konsultasi dengan BPK berkenaan dengan usulan alternatif persyaratan penebusan pupuk bersubsidi.
  5. Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada PT Pupuk Indonesia agar menunjuk pengampu (kontak person) distributor sebagai penanggung jawab untuk satu wilayah penyaluran atau pendamping yang bisa ditunjuk dari pihak dinas.
  6. Komisi IV DPR RI mengingatkan kembali agar jangan ada lagi praktik pembelian secara paket (*bundling*).
  7. Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog untuk mengantisipasi lonjakan harga daging, mengingat dalam waktu dekat akan menghadapi bulan puasa dan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN).
  8. Komisi IV DPR RI mengkritisi kesepakatan bersama antara pihak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Pemerintah Bali yang dinilai tidak ada ikatan hukum yang mengikat serta tidak mengatur secara detil.
  9. Komisi IV DPR RI meminta agar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melakukan tindak lanjut dengan Gubernur Provinsi Bali untuk membicarakan perjanjian dan menghasilkan kesepakatan yang mengikat serta mengusulkan untuk memberikan *privilege* kepada daerah, misalnya memberikan 50% bagian dari pemasukan kepada Provinsi Bali; atau juga lahan menggunakan mekanisme sewa maupun dibeli.
  10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan bersinergi untuk menjaga dan mengatur pemanfaatan koral atau karang hias serta mengawasi dengan ketat perdagangan koral atau karang hias sesuai kewenangan masing-masing kementerian agar kelestarian dan keberadaan karang hias di alam tetap terjaga.
  11. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan riset bersama untuk menemukan teknik budi daya atau penangkaran jenis-jenis baru selain yang sudah bisa dibudidayakan.
  12. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk mengembangkan usaha

budi daya perikanan laut di Desa Serangan dengan melaksanakan teknik tumpang sari ikan kerapu dengan Kerang Abalon dan/atau Lobster.

13. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membantu mendampingi para pembudi daya ikan dan meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi budi daya agar hasil produksi perikanan meningkat.
14. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan kajian mengenai dampak kerusakan ekosistem dan ekologi Taman Nasional Bali Barat akibat pembangunan Bandara Bali Utara. Dokumen kajian diserahkan kepada Komisi IV DPR RI dan selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti dengan kunjungan ke lokasi calon Bandara Bali Utara.
15. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Bali, dan masyarakat di sekitar Taman Nasional Bali Barat untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup sebagai bentuk implementasi TRI HITA KARANA yang merupakan konsep konsep spiritual, kearifan lokal, sekaligus falsafah hidup masyarakat Hindu Bali yang bertujuan untuk membentuk keselarasan hidup manusia.

## V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Bali. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak, baik dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 20 Februari 2021

Ketua Tim,

Ttd.

**Sudin, S.E.**

A-151



## Lampiran- Lampiran

1. Dokumentasi Kegiatan.
2. Tautan berita terkait.
3. Bahan-bahan dari mitra.

### 1. Dokumentasi Kegiatan

- a. Gudang Pupuk di Mengwi, Kabupaten Tabanan





b. Gudang Bulog di Sempidi, Kabupaten Badung







c. Budi Daya Koral di Serangan, Denpasar







d. Budi Daya Kerapu di Serangan, Denpasar







e. Taman Nasional Bali Barat, Kabupaten Buleleng







f. Balai Penelitian Ternak Unggul-Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar, Kabupaten Jembrana.





## 2. Tautan berita terkait

<https://koranbumn.com/2021/02/kunker-komisi-iv-dpr-ri-ke-gudang-beras-bulog/>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31802/t/Komisi+IV+Tinjau+Pasokan+Beras+di+Gudang+BULOG+Sempidi+Bali>

<https://radarbali.jawapos.com/read/2021/02/15/241608/stok-beras-di-bali-aman-tapi-daya-beli-menurun-dpr-harus-ada-bansos>

<https://www.baliberkarya.com/read/202102160002/apresiasi-keseriusan-nelayan-gus-adhi-dorong-serangan-jadi-desa-wisata-bahari-dengan-hasil-lautnya-melimpah.html>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31809/t/Usaha+Budi+Daya+Koral+Tidak+Mesti+dengan+Cara+Merusak+Alam>

<https://www.antaraneews.com/berita/2007265/komisi-iv-dpr-ke-bali-kpkhn-diharapkan-tak-rusak-ekosistem-laut>

<https://gerokgak.bulelengkab.go.id/berita/kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri-39>

<https://pancarpos.com/16/02/2021/calon-lokasi-bandara-tanpa-kajian-ketua-komisi-iv-dpr-ri-tidak-setuju-taman-nasional-dijadikan-bandara/>

<https://m.caping.co.id/news/detailmi/8210349>